



PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 11 / DPRK / 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan, penyusunan dan pembentukan Qanun - Qanun Kabupaten Aceh Besar agar terencana, terpadu, sistematis dan tidak tumpang tindih, harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Besar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka hasil penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 ( drt ) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati. 

17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Besar Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna ke - 8 Masa Persidangan ke - I DPRK Aceh Besar Tahun Sidang 2019-2020 tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 antara Bupati dengan Pimpinan DPRK Aceh Besar.
  2. Hasil Keputusan Badan Legislasi DPRK Aceh Besar dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar Hari Senin Tanggal 11 November 2019 tentang Pembahasan/Penetapan Prolegda Tahun 2020 dan Pembicaraan Terkait Rancangan Qanun yang sudah difasilitasi oleh Gubernur Aceh.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

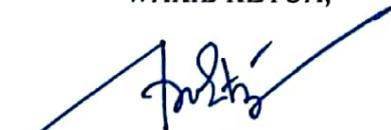
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dapat menyetujui penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho

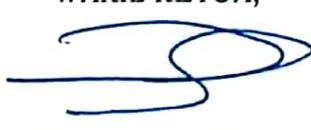
Pada Tanggal 27 November 2019 M  
30 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

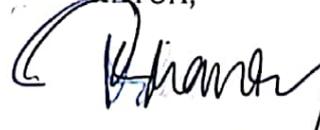
WAKIL KETUA,

  
BAKHTIAR, ST

WAKIL KETUA,

  
ZULFIKAR AZIZ, SE

KETUA,

  
ISKANDAR ALI, S. Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR : 11/DPRK/2019  
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2019 M  
30 RABIUL AWAL 1441 H

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020

NO	NAMA RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembangunan Gedung.
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemerintahan Dan Gampong.
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Kabupaten Aceh Besar.
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemanfaatan Jalan.
6.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah seulawah Raya.
7.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Besar.
8.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu Dan Fakir Miskin.
9.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
10.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Narkoba.
11.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Madrasah Diniyah Takmilliyah.
12.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.
13.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Aceh Besar.
14.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2038.

15.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern Dan Waralaba.
16.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
17.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
18.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Hotel (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
19.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Restoran (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
20.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Hiburan (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
21.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Reklame (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
22.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Sampah.
23.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Aceh Besar.
24.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Kepemudaan Aceh Besar.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA,

  
BAKHTIAR, ST

WAKIL KATUA,

  
ZULFIKAR AZIZ, SE

KETUA,

  
ISKANDAR ALI, S. Pd